

Sora Kekelengen



Edisi XVI / 2019

Sora Kekelengen

Dari Redaksi : Pembaca yang terkasih,
Sora Kekelengen diterbitkan untuk membangun motivasi dan pikiran kritis para pembaca khususnya kepada anggota kelompok dampingan Yayasan Ate Keleng / Partisipasi Pembangunan (YAK/PARPEM GBKP). Kami berharap artikel dan informasi yang dimuat benar - benar bermanfaat. Redaksi menerima sumbangan tulisan pengalaman, artikel dari setiap kalangan. Akhir kata kami mengucapkan selamat membaca. (red)

Diterbitkan Oleh :
YAYASAN ATE KELENG GBKP
Jl. Jamin Ginting Km. 45 Desa Sukamakmur, Kec. Sibolangit, Kab. Deliserdang 20357
Sumatera Utara - Indonesia. (0628) 97267 ; (0628) 97336
Email : parpem_gbkp@yahoo.com  youtube : Yayasan Ate Keleng GBKP
Website : www.baru.yakgbkp-parpem.or.id  ig : yak_gbkp
facebook : @yakgbkp

TIM REDAKSI :
Penanggung Jawab : Pdt. Yusuf Tarigan, MA.
Koordinator Berita : Indah Permata Sari Tarigan, S.Sos, Lesmawati Br PA, Amd,
Lasendri Br Tumanggor, Ir. Leader Suriawan Tarigan, Abdi
Tarigan, Lestari Sitepu, Amd
Keuangan : Yuni Sartika Br Ginting, SE, Esterina Br Tarigan
Kontributor dan Distributor : Seluruh Staf Yayasan Ate Keleng GBKP

PESTA AKBAR DAN PERTEMUAN RAKYAT
MASYARAKAT MANDIRI MEMBANGUN BANGSA
MELALUI CREDIT UNION
HARI ULANG TAHUN (HUT) KE 10 PERKELENG
“KEBERSAMAAN DALAM MEMBANGUN BANGSA”

Penulis: Rea P Bangun

Pertemuan Akbar dan Pesta Rakyat : Gerakan Masyarakat Mandiri Membangun Bangsa Melalui *Credit Union* sekaligus dilaksanakannya peletakan batu pertama kantor Persadan Kelompok Ate Keleng (PERKELENG) dan juga perayaan HUT 10 Tahun PERKELENG telah sukses dilaksanakan pada 30 Agustus 2019 yang lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Santoso, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Ketua Umum Moderamen GBKP, Pdt. Agustinus Purba, MA, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan juga dihadiri lebih kurang 9.000 anggota *Credit Union* Primer PERKELENG yang juga merupakan dampingan Yayasan Ate Keleng GBKP yang berasal dari 8 kabupaten / kota yaitu Kabupaten Karo, Deliserdang, Dairi, Langkat, Simalungun, Serdang Bedagai, Binjai Kota dan Medan Kota.

Tujuan dilaksanakannya pertemuan akbar dan pesta rakyat adalah untuk memperkokoh gerakan kerakyatan dan momentum membangun jaringan dengan : Dukungan Pemerintah dalam gerakan kerakyatan, legalitas dan perizinan koperasi di desa serta jaminan harga dan pemasaran hasil bumi (peternakan, pertanian dan hasil industri di desa serta hasil industri rumah tangga).

Pesta Rakyat ini dibuka dengan kebaktian yang dibawakan oleh Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesi (PGI) Pdt. Gomar Gultom, M.Th. Dalam khotbahnya kembali mengingatkan bahwa pentingnya kerja sama dan kepercayaan antar anggota dan kerja sama antar kelompok. Kepercayaan dan kerja sama yang telah luar biasa dilakukan selama ini tetap perlu ditingkatkan. Bupati Karo Terkelin Brahmna juga mengingatkan kembali bahwa seluruh anggota *Credit Union* harus tetap berperan aktif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di desa/daerah masing masing. Ketua Moderamen GBKP Pdt Agustinus Purba, MA juga menjelaskan bahwa semangat kebersamaan 10 tahun yang lalu telah sangat berhasil dan anggota juga sudah merasakan dampaknya. Dengan adanya keberadaan Yayasan Ate Keleng GBKP sebagai motor pendirian *Credit Union*, banyak pelaku usaha kecil yang berkembang melalui *Credit Union*. Pesta rakyat sekaligus perayaan HUT 10 tahun PERKELENG dilanjutkan dengan peninjauan *stand pameran* yang menampilkan produk-produk unggulan *Credit Union* masing masing. Pembukaan *stand pameran* juga ditandai dengan dibukanya pasar rakyat yang merupakan “luah” (Ind. oleh-oleh) dari tiap-tiap *Credit Union*.



MEMBANGUN EKONOMI KE”RAKYAT”AN MELALUI GERAKAN POLITIK

Penulis :Pdt. Yusuf Tarigan, MA.

I. Pendahuluan

Situasi yang sedang kita hadapi saat ini adalah situasi yang sangat kompleks. Secara khusus mengenai persoalan sosial-politik. Kita menghadapi situasi yang timpang dari segala sisi. Merespon situasi ini, peran lembaga-lembaga sosial sangat dibutuhkan di tingkat *grass root* dan kelompok marginal. Pendampingan terhadap masyarakat yang paling rentan ini bertujuan untuk mengurangi dampak ketimpangan tersebut yang ujung-ujungnya pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia).

Sebagai bagian dari masyarakat global kita juga perlu mengetahui respon negara-negara di dunia tentang situasi yang timpang itu. PBB yang beranggotakan 193 negara, untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk ke depan bersepakat dan merumuskan 17 poin *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kelanjutan dari *Milenium Development Goals* (MDGs) yang mengandung 3 dimensi utama yaitu:

- **Hak yang sama**, berkurangnya diskriminasi, pemarginalan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas, lansia, ODHA, dll.) Standard hidup untuk semua secara individu dalam masyarakat global.
- **Kemakmuran di atas Bumi**, tidak ada lagi kemiskinan, kurang gizi, stunting, kelaparan, (terjaminnya ketahanan Pangan)
- **Integrasi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan** (business ethic global) untuk kehidupan mendatang yang memperhatikan aspek *People, Profit dan Planet*.

Semangat SDGs adalah kesejahteraan bagi semua orang secara sosial, politik, ekonomi dan budaya/identitas.

Memperhatikan kesepakatan PBB di atas, diperlukan sebuah semangat yang benar-benar dapat menjadikan rakyat berdaulat dalam menentukan arah kemajuan sebuah bangsa. Ini merupakan peran sebenarnya masyarakat. Kuncinya di sini adalah masyarakat memaksimalkan peran/hak politiknya. Bagaimana hal ini bisa diwujudkan? Salah satunya akan dibahas dalam tulisan singkat ini.

II. Ekonomi Ke”rakyat”an

Menurut DR. MP. Ambarita, perkembangan teknologi, oleh kaum neoliberalisme diupayakan untuk menguasai pasar dunia demi meraup kekayaan dunia yang secara prinsipnya menyimpang dari prinsip perekonomian sejati. Kaum neoliberalis yang menguasai modal tidak lagi memperhatikan kesejahteraan masyarakat banyak atau dengan kata lain perkembangan teknologi akhirnya bukan lagi mensejahterakan masyarakat.

Dari hasil pemantauan, dapat disimpulkan bahwa kaum kapitalis/ pabrikan telah mempergunakan teknologi untuk memperkaya diri sendiri atau hanya untuk menumpuk kekayaan para pemilik modal (Kapitalis). Dalam konteks ini artinya pemerataan diabaikan dan peran manusia dikurangi. Akibatnya, akan timbul banyak pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan. Alternatif yang harus dipikirkan adalah, bagaimana membangun sebuah sistem permodalan untuk menciptakan usaha sendiri serta menghasilkan produk yang dibutuhkan agar dapat dinikmati secara bersama-sama. Dengan demikian ketergantungan pada produk mesin dan “memperkaya” para kapitalis menjadi terbatas. Namun, hal ini bukan upaya yang gampang untuk dilakukan, sebab jaringan para kapitalis begitu kuat, solid dan sistematis.

Salah satu alternatif yang dapat diupayakan adalah menggiatkan gerakan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan artinya: pelakunya adalah rakyat dan manfaatnya terbesar hasilnya dinikmati oleh rakyat (dari, oleh, dan untuk rakyat). Sistem ini berupaya mengatasi kesulitan ekonomi di skala rumah tangga. Semangat/jiwanya adalah untuk membebaskan diri dari kungkungan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dalam mengelola situasi sosial ekonomi. Aksi-aksinya bertujuan untuk memerangi keadaan dari dibodohi dan dimiskinkan menjadi sadar dan kritis. Salah satu jalan yang ditempuh adalah menciptakan modal bersama dan dipinjamkan secara bergilir, tepat sasaran dan membantu. Tersedianya sebuah lembaga keuangan masyarakat/rakyat yang sehat, besar, dan abadi. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggota melalui pelayanan keuangan yang profesional, ramah dan

tangguh yang akhirnya menghasilkan perubahan pada aspek fisik, mental, emosional dan spiritual para anggotanya.

III. Gerakan Politik

A. Apa Itu Gerakan Sosial Politik?

Gerakan sosial politik terjadi karena adanya perubahan sosio-ekonomi, budaya dan politik. Menurut Rudolf Haberle, gerakan sosial mengandung pengertian gerakan bersama, yaitu suatu bentuk kekacauan di antara manusia, kegelisahan, serta usaha bersama untuk mencpai tujuan yang divisualisasikan, khususnya suatu usaha untuk mengubah dalam kelembagaan sosial tertentu.

Blumer menyatakan pergerakan sosial ditandai dengan kondisi yang penuh kegelisahan karena perasaan ketidakpuasan terhadap kehidupan sehari-hari dan adanya keinginan serta harapan untuk meraih tatanan kehidupan yang lebih baru dilakukan secara berasama-sama.

Blumer menyatakan pergerakan sosial ditandai dengan kondisi yang penuh kegelisahan karena perasaan ketidakpuasan terhadap kehidupan sehari-hari dan adanya keinginan serta harapan untuk meraih tatanan kehidupan yang lebih baru dilakukan secara berasama-sama.

James Scott menjelaskan gerakan sosial dan politik sebagai bentuk gerakan perlawanan petani, yaitu bentuk perlawanan (resistance) penduduk desa dari kelas yang lebih rendah (dalam hal sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas. Kata Scott, gerakan ini bersifat:

- Terorganisir, sistematis dan kooperatif
- Berprinsip atau tanpa pamrih
- Mempunyai akibat-akibat revolusioner
- Mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri

B. Teori Gerakan sosial politik:

1. Teori Contagion (penularan crowds)

Menurut Le Bon, masyarakat dalam situasi *crowd* (kerumunan) identitas pribadinya ditekan pada drajad yang paling rendah. Penularan *crowd* bisa menghilangkan semua perbedaan kultural dan pendidikan diantara anggota-anggota *crowd*, mereka direduksi hingga ke *common denominator* (faktor persekutuan) paling rendah. Mereka bisa cenderung barbar dan bisa berperilaku irasional atas dasar insting. Ini juga bisa kuat mendorong ke arah cara berpikir yang paling absurd: kepercayaan melampaui penalaran.

2. Teori Deprivasi Relatif (Relative Deprivation of Theory)

Teori Relative Deprivation atau deprivasi relatif (DR) merupakan salah satu teori klasik gerakan sosial politik. Dianggap klasik sebab teori ini lebih banyak menjelaskan gejala kolektif dari masyarakat agraris tradisional. Teori ini banyak dipakai untuk menjelaskan gejala gerakan sosial politik masyarakat petani, nelayan, dan masyarakat agraris lainnya. Ted Robert Gurr, Denton E. Morrison dan James Davis menganggap tingkah laku agresif (khususnya tingkah laku agresif massa) timbul sebagai akibat adanya frustrasi dalam masyarakat. Perasaan Depreviasi, dari ketidakpuasan atas situasi seseorang, bergantung apakah yang ingin dimiliki seseorang tersebut atas suatu hal. DR dimaksud tidak hanya terbatas mengenai tujuan yang diberikan kepada seseorang, tetapi juga dia merasa mempunyai hak untuk mencapai tujuan tersebut, merasa pantas memperolehnya, paling tidak dibawah kondisi tertentu.

IV. Upaya Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Politik

Untuk melahirkan sebuah sistem perekonomian yang pro-rakyat, gereja dan seluruh institusi sosial lainnya harus melakukan sesuatu. Lagi menurut DR. MP. Ambarita, tokoh-tokoh agama dari denominasi keagamaan di Indonesia seharusnya turut mengembangkan konsep-konsep perekonomian masyarakat ini: antara lain tokoh-tokoh agama Islam telah mengajukan konsep tentang perekonomian syariah dan tokoh-tokoh agama Kristen hendaknya juga memunculkan

konsep-konsep perekonomian nasional antara lain ekonomi kerakyatan versi Kristiani melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Credit Union (CU).

Salah satu perwujudan dari pada *informal mikro system* ini oleh YAK/PARPEM GBKP diperkenalkan CU/OR. Gerakan ini disemangati oleh sebuah pernyataan pengagas CU, Fredrick Willem Raiffiesen. Beliau berpendapat bahwa kesulitan si miskin (rakyat) hanya dapat diatasi dengan jalan mengumpulkan uang yang dari si miskin itu sendiri dan kemudian meminjamkan uang itu kepada sesama mereka. Saling tolong menolong melalui kerja sama itulah dianggap satu-satunya pemecahan yang permanen. Raiffeisen berkesimpulan bahwa derma tidak akan menolong manusia untuk mulai bantu dirinya, sebaliknya malah merendahkan martabat manusia yang menerimanya. Maka di dalam semangat ini, penghargaan terhadap HAM menjadi utama dan pemerataan sangat diperhatikan.

Kelihatannya memang dengan membangun gerakan masyarakat melalui aspek permodalan (kooperatif) untuk penguatan ekonomi sudah terlihat hasil yang nyata. Namun, memperhatikan hal ini tidaklah cukup. Itu hanya satu aspek saja dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Upaya membangun ekonomi melalui gerakan politik sebenarnya hendak menuju kepada akibat-akibat yang revolusioner itu. Upaya ini harus

1. Kemajuan Teknologi informasi saat ini
2. Perkembangan atau perbaikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih pro rakyat
3. Munculnya gerakan-gerakan yang kelihatan hampir sama dengan gerakan sosial
4. Perubahan strategi dan kebijakan lembaga-lembaga keuangan

V. Simpulan

Segala bentuk ketimpangan yang terjadi akibat sistem ekonomi atau jiwa para pelaku ekonomi harus diatasi. Lembaga Sosial (YAK/PARPEM GBKP) harus berbenah untuk itu. Dalam rangka menyukseskan pemenuhan SDGs, Lembaga Sosial sebagai institusi harus pula memikirkan optimalisasi pelayanan yang sejalan dengan program global (SDGs) dan Nasional (perwujudan cita-cita kemerdekaan).

KONSOLIDASI AD/ART CU (Credit Union)

DAMPINGAN YAK/PARPEM GBKP

Penulis : Elys Monica Br Pasaribu, S.Pd

Sebagai bagian integral dari proses gerakan *Credit Union*, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) *Credit Union* memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting. AD/ART merupakan undang-undang dasar dalam setiap pembentukan organisasi *Credit Union*. Dimana AD/ART *Credit Union* digunakan sebagai landasan operasional dalam proses berjalannya sebuah *Credit Union*, yang berisi tentang segala peraturan-peraturan yang akan dijadikan pedoman dasar setiap pelaksanaan atau *management* tata kelola *Credit Union* yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh elemen yang ada didalam *Credit Union* tersebut, sehingga diharapkan AD/ART senantiasa menjadi sebuah hukum tertinggi dalam rambu-rambu pelaksanaan kegiatan yang ada didalamnya.

AD/ART sendiri dibuat dan ditentukan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam organisasi *Credit Union* tersebut. Dimana lembaga Yayasan Ate Keleng/Partisipasi Pembangunan GBKP (YAK/Parpem GBKP) menjadi lembaga pendampingan masyarakat, termasuk didalamnya pendampingan *Credit Union* yang ikut serta bersama dengan seluruh kelompok *Credit Union* dampingan Yayasan Ate keleng/Parpem GBKP membuat dan menyusun AD/ART melalui pertemuan konsolidasi dan disahkan juga melalui forum konsolidasi di Yayasan Ate Keleng/Parpem GBKP.



Gambar :
Bernyanyi Bersama Peserta Konsolidasi

Melalui forum inilah AD/ART dapat berubah dari yang sebelumnya. Pembaharuan atau Revisi AD/ART ini dilakukan ketika melihat situasi dan kondisi dimana AD/ART yang lama sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi sebenarnya yang ada saat ini, maka perlu direvisi dan dibenarkan kembali melalui

pertemuan konsolidasi dengan mendengar dan melihat situasi yang ada disetiap kelompok dampingan, sehingga memusyawarahkan secara bersama hal-hal yang perlu direvisi tanpa melenceng dari cita-cita pendirian *Credit Union* itu sendiri. Atas dasar itulah, maka Konsolidasi AD/ART kelompok CU dampingan Yayasan Ate Keleng/Perpem GBKP dilaksanakan dan telah terselenggara pada hari Jumat, 26 Juli 2019 di Hall/Jambur Reatret Center Taman Jubelium 100 Tahun GBKP Suka Makmur.

Konsolidasi ini dihadiri 126 kelompok CU dampingan Yayasan Ate Keleng/Parpem GBKP dengan jumlah peserta 389 orang. Saat berjalannya acara konsolidasi terlihat antusiasme peserta yang cukup besar dari keaktifan dan partisipasi peserta konsolidasi.

Melalui pertemuan ini, terdapat beberapa Bab dan Pasal yang di revisi di AD/ART dan beberapa Bab dan Pasal yang di tambah disesuaikan dengan keadaan CU dampingan Yayasan Ate Keleng/Parpem GBKP saat ini. Selain direvisi dari aspek keadaan CU, revisi AD/ART ini juga disesuaikan dari AD/ART CU dampingan yang sudah berbadan Hukum. Karena mengingat saat ini sudah ada 6 dari 9 kelompok dampingan Yayasan Ate Keleng/Perpem GBKP yang telah mengurus badan hukum saat ini sudah resmi berbadan hukum.

Diharapkan hasil konsolidasi AD/ART tersebut dapat memperkuat seluruh kelompok dampingan Yayasan Ate Keleng/Parpem GBKP dengan aturan-aturan yang relevan dengan keadaan kelompok CU dampingan Yayasan Ate Keleng/Parpem yang tertuang di AD/ART yang disusun dan disepakati bersama.



Gambar: Tanggapan dari CU “Galimadu” Berdikari

Gambar: Tanggapan dari CU “Pardis” Kemenangan Tani

NARKOBA DAN HIV/AIDS Penulis: Rupina Br Purba, S.PAK

Saat ini pengguna narkoba dimana mana semakin bertambah yang tidak hanya ditingkat kota tetapi juga sampai ke desa-desa, pengguna tidak hanya kalangan anak muda tetapi termasuk kalangan orangtua.

Arti sebenarnya narkoba adalah : Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya; Artinya usia ialah usia produktif atau usia pelajar. Narkoba merupakan barang haram dan tidak dapat digunakan tanpa izin pihak yang berwenang, sebagai dampak negatif menggunakan narkoba tidak hanya berakibat fatal bagi diri sendiri, melainkan juga berdampak bagi orang lain dan lingkungan. Narkoba mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf central.

Narkoba berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi-sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Perlu diketahui jenis-jenis narkoba yang populer di Indonesia : Ganja, sabu, ekstasi, heroin.

Pengguna narkoba sangat identik dengan tertularnya virus HIV, sehingga realita yang ada bahwa orang yang terpapar HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah pengguna narkoba jarum suntik, artinya virus bukan di narkobanya tetapi pada jarum suntik yang digunakan secara berganti gantian. Pada jarum suntik secara kasat mata tertinggal dalam darah yang kemungkinan virus ada dalam darah tersebut. Pengguna narkoba yang tidak menggunakan jarum suntik dan tidak melakukan hubungan sex bebas akan bebas dari virus HIV sebab tidak ada pertukaran cairan dan darah.

Perlu juga diketahui bahwa bunga kecubung, bunga terompet mengandung jenis narkoba yang sangat tinggi sehingga bagi pengguna yang tidak mempunyai uang dapat mengalihkannya untuk mengolah bunga kecubung dan bunga terompet tersebut. Serbuk bunga terompet dan daunnya ketika diolah membuat pengguna tidak dapat sadarkan diri (testimoni seorang laki-laki berusia 55 tahun yang tidak sadarkan diri selama 10 jam). Sehingga kita tidak heran lagi ketika pengguna narkoba semakin banyak sebab untuk mendapatkannya juga sangat mudah dan tidak membutuhkan modal yang banyak.

Menurut Kadis BBN Kabupaten Karo : Heppi Karo karo (Public Speaking YAK GBKP di Kabanjahe, 27 Mei 2019): untuk meminimalisasikan pengguna narkoba di Tanah karo khususnya maka setiap keluarga, gereja, pemerintahan, masyarakat harus secara bersama-sama untuk membrantasnya sebab pihak aparat kepolisian dan BNN saja tidak akan sanggup karena peluang masuknya narkoba dapat dari segala arah (seluruh lapisan harus menjadi team).

Untuk meningkatkan kesadaran mulailah dari hal yang kecil dengan membangun komunikasi bagi keluarga sehingga anak-anak dan pasangan kita semakin sadar. Dampak lain dalam komunikasi adalah sebagai orangtua mengetahui perkembangan/pergaulan anak-anak sebab pendidikan bagi anak anak tidak cukup hanya dari bangku pendidikan yang hanya beberapa jam.



Gambar : Foto Bersama Fasilitator dan Peserta Pelatihan

APAKAH LEARNING CENTER ITU ...? Penulis : Dea Dwinta Br Bangun, SE

YAK/Parpem GBKP adalah salah satu unit Diakonia GBKP yang mempunyai misi untuk mewujudkan secara nyata “Kasih Allah di Bumi” Khususnya di tengah jemaat GBKP dan masyarakat pada umumnya.

Dalam perjalanannya, YAK/Parpem GBKP telah mampu berbuat banyak dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan jemaat dan masyarakat. YAK/Parpem GBKP senantiasa terus berupaya menjadi kreator dan inovator bagi jemaat namun dengan tetap memperhatikan keselestarian alam, Sosial, Ekonomi, itu semua karena kasih karunia Allah.

YAK/Parpem GBKP juga tidak menutup mata melihat keadaan yang ada. Dampak dari kemajuan Zaman dan semakin canggihnya Teknologi diberbagai bidang secara langsung maupun tidak, telah mampu merubah perilaku dan gaya hidup masyarakat. Ada yang berdampak positif, tetapi banyak juga yang berdampak negatif. Smartphone berbasis Android, Drone, Skype bahkan Digitalisasi Keuangan, E-Transaksi dll, semakin memudahkan kehidupan masyarakat. Terjadi persaingan-persaingan antar sesama, antar perusahaan bahkan antar negara, baik bersaing secara sehat atau pun secara tidak sehat. Hagemoni, Dominasi dan Monopoli bukanlah sifat dari manusia yang diberikan Allah. Berangkat dari keadaan demikianlah maka YAK/Parpem GBKP memutuskan untuk berbuat sesuatu yang nyata, terencana dan terukur serta berguna bagi masyarakat.

Kesuksesan dan keberhasilan, hanya bisa didapat melalui perencanaan yang matang, kerja keras, ulet dan sabar, juga harus ditopang oleh doa. Keberhasilan membutuhkan orang-orang yang terampil dan kompeten dibidangnya.

Demikianlah maka pada tanggal 15 April 2019, YAK/Parpem GBKP telah melakukan Launching Learning Center (LC) YAK GBKP.

Yang diharapkan agar LC mampu memberi jalan dan sistem yang akurat tentang masalah-masalah yang dihadapi organisasi kemasyarakatan dampingan YAK maupun instansi-instansi yang lain dalam rangka kaderisasi. LC juga diharapkan mampu melahirkan kader-kader organisasi yang jujur, terpercaya, handal dibidangnya dan Takut akan Tuhan.

Di masa mendatang LC memperluas cakupan makalah yang dibahas, mencakup sosial, budaya dan lingkungan. Mengapa Learning Center? Karena istilah ini dirasa lebih tepat dalam melakukan inovasi.

Sistem pendidikan di LC adalah semi formal. Golongan antara Teori-Praktek dan Seminar dengan metode pendidikan yang dipakai tidak melulu *paedagogy* (*sumber pengetahuan dari satu arah*) tetapi lebih kepada *andragogy* (*sumber pengetahuan banyak arah*). Para Pengajar di LC tidak disebut dengan Guru/Dosen/Ahli tetapi disebut Fasilitator. Tetapi di pastikan fasilitator di LC sudah sangat teruji di bidangnya baik secara teori maupun praktek di lapangan.

Dan tepat pada tanggal 20-22 Agustus 2019, Learning Center Membuka Pelatihan Pertama nya yang dilaksanakan di Learning Center yaitu Pelatihan Administrasi Pembukuan *Credit Union*. Dengan Fasilitator Pdt.Yusuf Tarigan, S.Si.,Ma , Lestari Sitepu, A.Md, Abdi Tarigan dan Elys Monica Br Pasaribu.

Dengan Materi yang dibawakan yaitu mengenai Pengenalan Pembukuan *Credit Union*, Teori Dasar Akuntansi *Credit Union*, Serta Praktek Pembukuan *Credit Union* ke Jurnal Tabelaris Laporan Keuangan.

Antusias Peserta dalam Pelatihan Administrasi Pembukuan *Credit Union* ini sangatlah Positif, terbukti dari Jumlah peserta yang hadir melewati dari target yang diharapkan. Ini semua terjadi karena kelompok Dampingan YAK sangat rindu akan Pelatihan seperti ini dan upaya kelompok dampingan juga untuk langkah kaderisasi dengan mengirimkan Peserta/Pengurus CU yang baru yang dirasa perlu dalam mengikuti Pelatihan ini.



Gambar : Foto bersama fasilitator dan peserta pelatihan

Pelatihan Pertama yang dilaksanakan di Learning Center berjalan dengan Baik selama 3 hari 2 malam.

Berikut adalah Foto Bareng antara Peserta dengan Fasilitator yang dilakukan setelah acara Penutupan Pelatihan Tersebut. Mereka merupakan Peserta Angkatan I Learning Center YAK GBKP, yang berasal dari 15 Kelompok CU Dampingan YAK GBKP dengan jumlah 22 orang.

Langkah berikutnya, Learning Center kembali membuka pelatihan-pelatihan yang telah disusun dan dirancang sesuai kebutuhan kelompok dan masyarakat. Dan berikut jadwal pelatihan ditahun 2019.

JADWAL PELATIHAN	
LEARNING CENTER 2019	
20-22 AGT 2019	ADMINISTRASI PEMBUKUAN CU
3-4 SEPT 2019	APA ITU CREDIT UNION ?
16-18 SEPT 2019	MONEV DANA DESA
9-11 OKT 2019	MANAGEMENT KEUANGAN CU
21-23 OKT 2019	ENERGI TERBARUKAN
4-27 NOV 2019	MANAGER CREDIT UNION
2-3 DES 2019	MONEV CREDIT UNION

LEARNING CENTER YAK/PAPEM GBKP
JL.JAMIN GINTING KM. 45 DESA SUKAMAKMUR, KEC.SIBOLANGIT, KAB. DELI SERDANG 20257 SUMUT
082274624020 (DEA) 081280737779 (LC) LEARNING CENTER YAK @LEARNINGCENTER_YAK

Dan pelatihan terdekat di Bulan september 2019 yaitu :

1. APA ITU CU ? Pelatihan Pendidikan Dasar *Credit Union* yang sasarannya untuk Kelompok CU yang baru terbentuk serta Pengurus CU baru. Yang dilaksanakan tanggal 3 -4 September 2019
2. Monev Dana Desa, Pelatihan Mengenai bagaimana mengawasi dan mengevaluasi Dana Desa. Yang dilaksanakan tanggal 16 - 18 September 2019

PELATIHAN

APA ITU CU ?

3-4 September 2019

NARASUMBER :

SUKAMAKMUR, LEARNING CENTER YAK GBKP

0812-8073-7779 (LC)
0822-7462-4020 (DEA)

DAFTAR REGISTRASI
KELOMPOK CU
DAMPINGAN YAK

Rp. 314.000,-
ANGGOTA CU

Rp. 464.000,-
UMUM

TERMASUK:
Kamar
Ruang
Pelatihan
5 Kali Makan
3 Kali Snack
Materi
Sertifikat
Merchandise

PEMBANGUNAN BENDUNGAN LAU SIMEME

Penulis: Junerson Ginting, S.Hut

Sukamakmur,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai konstruksi Bendungan Lau Simeme Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini direncanakan dapat selesai selama 4 (empat) tahun. Sebagai salah satu Proyek Straregis Nasional(PSN) yang ditetapkan oleh Presiden JokoWidodo, bendungan lauSimeme juga merupakan bagian dari pembangunan 65 bendungan oleh kementerian PUPR. Bendungan Lau Simeme memiliki kapasitas tampung sebesar 22 juta meter kubik yang bertujuan mengurangi resiko banjir bagi warga kota Medan dan Deli Serdang. Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat untuk suplai air baku kepada PDAM Tirtanadi dengan kapasitas 3.000 liter per detik, sumber irigasi Bandar Sidorasseluas 3.082 hektare dan daerah irigasi Lantasan 185 hektare. Manfaat lainnya adalah potensi pembangkit listrik (PLTA minihidro) sebesar 2,2 MW serta sebagai pariwisata.

Pembangunan PSN yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar proyek ternyata menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat sekitaran bendungan Lau Simeme. Sebenarnya beberapa institusi serta Universitas telah beberapa kali berkunjung kedesase kitaran bendungan. Padat ahun 1991/1992 tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) datang kedesa Kuala Dekah Kecamatan Biru-biru untuk melakukan studi kelayakan pembangunan bendungan. Kemudian sekitar tahun 2005/2006 dilakukan studi tentang struktur tanah, studi mengenai batu di desa Mardinding Julu dan studi AMDAL yang dilakukan oleh tim dari Universitas Sumatera Utara. Masyarakat mengetahui hal tersebut dan tidak mendapatkan pemberitahuan secara resmi.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat sangat pelik mulai dari dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 44 Tahun 2005 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara yang mencakup Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian ke enam desa yang terkena dampak pembangunan dikategorikan sebagai Hutan Produksi Tetap. Tahun 2009 Mahkamah Agung kemudian membatalkan SK Menteri Kehutanan No. 44 Tahun 2005. Tahun 2014, terbit lagi Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 579 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat tidak mengetahui dimana letak tata batas yang dimaksud dari SK tersebut.

Bahwa di atas lokasi tersebut terdapat pemukiman penduduk ± 260 KK (Kepala Keluarga) yang telah mendiami tempat tersebut 4 (empat) generasi secara turun temurun (± 100 tahun).

Fakta ditemukan di dalam desa terdampak antara lain, kuburan pendiri kampung di desa Mardinding dengan tulisan meninggal Tahun 1924, pokok durian danduku di desa Kuala Dekah yang sudah berumur ratusan tahun, situs budaya yang terletak di desa Kuala Dekah, beberapa perumahan peninggalan Belanda, dan bukti beberapa fotokopi KTP yang lahir di desa-desatersebut. Lahan di desa tersebut sudah dimanfaatkan sebagai mata pencarian utama berupa berladang, kebun, sawah dll, yang merupakan dasar kehidupan masyarakat.

Dari permasalahan tersebut masyarakat di sekitaran Bendungan Lau Simeme merasa di permainkan dikarenakan sejak 2018 tidak ada informasi mengenai ganti rugi tanah sementara proyek telah berjalan dari awal tahun 2018 dan sampai saat ini tetap berjalan.

Masyarakat yang terdampak bendungan Lau Simeme telah beberapa kali menemui pihak terkait hingga Rapat Dengan Pendadapat di Gedung DPRD Deli Serdang tetapi tidak membuahkan hasil yang memuaskan masyarakat.



Pada bulan September Tahun 2018 masyarakat didampingi oleh Gereja GBKP yang berada di desa mereka berdiskusi bagaimana jalan keluar tentang masalah tersebut. Sehingga pada bulan yang sama masyarakat bersama Badan Pengurus Klasis Medan Deli Tua berkunjung ke kantor Yayasan Ate Keleng untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat yang terdampak bendungan Lau Simeme tersebut.

Sehingga pada bulan Desember Tahun 2019 terbentuklah perkumpulan Forum Advokasi Masyarakat Tedampak Hutan dan Bendungan Lau Simeme yang beranggotakan Persatuan Arih Ersada, Yayasan Ate Keleng GBKP, Bakumsu, Diakonia GBKP, BPMK Medan Delitua, Biro Hukum GBKP, YAPIDI, WALHI dan NGO yang bersedia membantu masyarakat yang terdampak bendungan Lau Simeme.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat sangat pelik mulai dari dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 44 Tahun 2005 tentang Kawasan Hutan

Provinsi Sumatera Utara yang mencakup Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian ke enam desa yang terkena dampak pembangunan dikategorikan sebagai Hutan Produksi Tetap. Tahun 2009 Mahkamah Agung kemudian membatalkan SK Menteri Kehutanan No. 44 Tahun 2005. Tahun 2014, terbit lagi Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 579 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat tidak mengetahui dimana letak tata batas yang dimaksud dari SK tersebut.

Bahwa di atas lokasi tersebut terdapat pemukiman penduduk ± 260 KK (Kepala Keluarga) yang telah mendiami tempat tersebut 4 (empat) generasi secara turun temurun (± 100 tahun).

Fakta ditemukan di dalam desa terdampak antara lain, kuburan pendiri kampung di desa Mardinding dengan tulisan meninggal Tahun 1924, pokok durian danduku di desa Kuala Dekah yang sudah berumur ratusan tahun, situs budaya yang terletak di desa Kuala Dekah, beberapa perumahan peninggalan Belanda, dan bukti beberapa fotokopi KTP yang lahir di desa-desatersebut. Lahan di desa tersebut sudah dimanfaatkan sebagai mata pencarian utama berupa berladang, kebun, sawah dll, yang merupakan dasar kehidupan masyarakat. Kegiatan pertama yang dilakukan Forum ini menyurati Komnas HAM, KSP serta permintan audiensi ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tidak lama dari surat tersebut dilayangkan DPRD Provinsi Sumatera Utara menerima permintaan audiensi oleh forum. Pada saat melaksanakan RDP di kantor DPRP Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh masyarat yang terdampak bendungan Lau Simeme mengharapkan agar proyek tersebut diberhentikan sementara sampai saat ganti rugi lahan masyarakat dapat diselesaikan. Lahan yang dimaksudkan oleh masyarakat seluas ± 420 hektar (Ha) lewat Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui SK 481/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 yang mencakup 6 (enam) desa,

yaitu; Desa Kuala Dekah, Desa Sari Labajahe, Desa Rumah Gerat, Desa Penen, Desa Mardinding Julu, dan Desa Peria-ria.



Hasil dari pertemuan dengan DPRD mereka akan membantu masyarakat terdampak bendungan Lau Simeme dan akan melaksanakan diskusi dengan BPN serta dinas Kehutanan dalam pelepasan lahan masyarakat dari kawasan hutan dan mereka bersedia meninjau langsung lokasi yang dikatakan oleh masyarakat yang diakui oleh masyarakat telah ditempati selama puluhan bahkan ratusan tahun mulai dari kakek nenek mereka.

Hasil dari perjuangan Forum tersebut membuahkan hasil pada bulan Agustus 2019 masyarakat mendapatkan kabar gembira dimana lahan mereka telah di keluarkan dari kawasan hutan. Hanyasaja Forum mengharapkan adanya kerjasama kelompok dikarenakan kegiatan ganti rugi belum terlaksana. Agar kelompok tetap bersatu dalam penyelesaian surat-surat administrasi dalam pelaksanaan ganti rugi lahan mereka.

